



BPPBJ

Badan Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa Prov. DKI Jakarta

**RENCANA KERJA BADAN
PELAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA PROVINSI
DKI JAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkenan-Nya Rencana Kerja (Renja) Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 dapat disusun dengan baik.

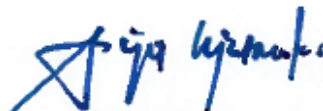
Renja merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang disusun dengan memedomani Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rankhir Renja Perangkat Daerah TA 2022. Secara substansi, dokumen Renja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2022 memuat hasil evaluasi Renja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa tahun lalu (n-2), tujuan dan sasaran Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, serta rencana kerja dan pendanaan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa.

Kami sadari bahwa masih terdapat kekurangan yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan dalam perencanaan pembangunan, khususnya urusan Keuangan. Oleh karena itu, rekomendasi yang konstruktif tetap akan menjadi masukan dalam identifikasi permasalahan pembangunan, arah kebijakan pembangunan, program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja, penyelarasan dengan sasaran dan prioritas nasional, dan identifikasi program dan kegiatan menurut kewenangan Provinsi dan Kota/Kabupaten di masa yang akan datang.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan dokumen Renja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai kita semua.

Jakarta, 22 Juli 2021

Plt. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Sigit Wijatmoko, A.P, M.Si
NIP. 197408301993111001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi i-1

Executive Summary i-3

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-2

1.2. Landasan Hukum I-3

1.3. Maksud dan Tujuan I-6

1.4. Sistematika Penulisan I-7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU II-1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah II-2

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II-11

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah II-13

2.4. Review terhadap PD..... II-13

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-18

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH III-1

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional III-2

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah III-3

3.3. Program dan Kegiatan III-4

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH IV-1

4.1. Rencana Kerja, Target, dan Pendanaan IV-2

BAB V PENUTUP V-1

Lampiran I Tabel 2.1 Realisasi Capaian Program Badan Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

Lampiran II Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan
Pencapaian Renstra Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa s.d
tahun 2020 Provinsi DKI Jakarta

Lampiran III Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Badan Pelayanan Pegadaan
Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta s.d. Tahun 2020.

Lampiran IV Tabel 2.4 Review Terhadap PD Tahun 2022
Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran V Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pelayanan
Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022.

**Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun
2022**

- | | |
|-------------|--|
| Lampiran VI | Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2022 Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta |
| Lampiran V | Tabel 4.1 Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2022 |

EXECUTIVE SUMMARY

Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022 dan mengacu pada Pasal 16 Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu, penyusunan Renja BPPBJ tahun 2022 juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2017 – 2022 sebagai penjabaran dari RPJMD Perubahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022 urusan Pengadaan Barang/Jasa yang kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 diubah menjadi urusan Sekretariat Daerah.

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022 telah melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan proses Pengadaan Barang/Jasa oleh Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (UPPBJ) serta pelayanan Pengadaan Barang/Jasa tertentu memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis pelayanan proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator kinerja dalam RPJMD Perubahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022 yang mendukung Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut :

1. Persentase pengadaan Barang/Jasa tepat waktu

Proses penyusunan Renja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta mengacu pada PD Provinsi DKI Jakarta, Selain itu juga dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap Renja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa tahun sebelumnya, target kinerja tahun 2021 dalam Renstra Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2017-2022 dan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional. Ada 43 dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa tahun 2021.

Terdapat 1 (satu) program utama yang diampu oleh Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa. Selain itu terdapat Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang bersifat umum dan digunakan oleh seluruh OPD.

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2021 adalah mendukung tercapainya Misi ke-3 RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-

Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

2022, secara berurutan yaitu “Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas

PENDAHULUAN

Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud & Tujuan, Sistematika Penulisan



1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dalam pasal 15 Ayat (1) mengamatkan bahwa "Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah".

Proses penyusunan Renja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta mengacu pada RKPD Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu penyusunan Renja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD Tahun 2021. Selain itu juga dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap Renja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa tahun sebelumnya, target kinerja tahun 2021 dalam Renstra Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2017-2022 dan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
24. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;

27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
29. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah, dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
30. Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha;
31. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
32. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2016;
33. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
34. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2020
35. Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu;
36. Peraturan Gubernur Nomor 261 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
37. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
38. Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah;
39. Keputusan Gubernur Nomor 1228 Tahun 2020 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;

40. Keputusan Gubernur Nomor 1263 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 disusun untuk mewujudkan target kinerja tahun 2022 dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki.

Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa ke dalam rencana operasional tahunan;
2. Menyediakan arahan/pedoman bagi aparatur Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2022;
3. Menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan tugas Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa.

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen Renja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijabarkan penjelasan ringkas tentang Renja perangkat daerah, keterkaitan antara Renja dengan RKPD dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, serta proses penyusunan Renja.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 (n-2) dan perkiraan capaian tahun 2020 (n-1); analisis kinerja pelayanan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa; isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta;

review terhadap PD Tahun 2022 dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang bersumber dari hasil Rembuk RW, usulan langsung masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijabarkan penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, program dan kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup yang terdiri atas catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan
Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-
isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi, Review
Ranwal RKPD, Penelaahan Program dan Kegiatan
Masyarakat



2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa

Pada bagian ini menjelaskan tentang evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2020 dan Capaian Renstra Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada Tahun 2020. Fungsi evaluasi ini adalah dalam rangka penyediaan informasi-informasi yang berguna untuk menentukan strategi dan kegiatan Renja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2022. Evaluasi atau reviu akan dilakukan terhadap realisasi program dan kegiatan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2020 serta realisasi target sasaran Renstra Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada Tahun 2020. Selain itu juga akan dilakukan reviu terhadap pelaksanaan kegiatan tahun 2021 dan proyeksi realisasi anggaran tahun 2021.

Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2020 ditinjau dari capaian program dapat dilihat dalam Tabel 2.1. Program yang digunakan pada tahun 2021 berbeda dengan program yang digunakan untuk tahun 2017-2022 dalam Renstra Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2017-2022, sebab proses penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 dilakukan pada tahun 2020 dan proses penyusunan RPJMD Perubahan serta Renstra OPD masih Perubahan akibat dampak pandemik Covid-19 dan terbitnya Permendagri 90 Tahun 2019. Landasan penggunaan program tahun 2020 adalah Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 tentang Penetapan Daftar Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018, sementara selanjutnya nomenklatur kegiatan dan program menyesuaikan dengan P90 (lengkapi).

Terdapat 1 (satu) program utama yang diampu oleh Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa yaitu program Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang/jasa. Selain itu terdapat 1 (satu) program yang bersifat umum dan digunakan oleh seluruh OPD yaitu program “Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi”.

Realisasi capaian program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan yang terdiri dari 2 (dua) indikator antara lain yaitu sebanyak 2 (dua) indikator realiasi

Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

capaian sesuai dengan target, indikator realiasi capaian melebihi target, dan indikator realiasi capaian tidak tercapai dengan nilai capaian 0% (nol persen).

Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Tabel 2.1 Realisasi Capaian Program Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase pengadaan Barang/Jasa tepat waktu	Jumlah Pengadaan barang/jasa tepat waktu dibagi jumlah paket lelang yang sudah selesai. Tepat waktu adalah lebih cepat atau sama dengan standar waktu sesuai ketentuan/peraturan	90	90	100%	
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks kepuasan pelayanan kantor berdasarkan pelaksanaan program pada monev. Index 1 = 0-25%, Index 2 = >25%-50%, Index 3 = >50%-75% dan Index 4 = >75%-100%	4	4	100%	
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks kepuasan pelayanan KDO berdasarkan pelaksanaan program pada monev. Index 1 = 0-25%, Index 2 = >25%-50%, Index 3 = >50%-75% dan Index 4 = >75%-100%.	4	4	100%	

Berdasarkan tabel 2.1 dijelaskan bahwa indikator kinerja program dapat mencapai target. Untuk realisasi capaian Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki 1 (satu) indikator adalah sebesar 90% dari target yang dari target yang ditentukan sebesar 90%. Dalam pembahasan APBDP oleh SKPD dan DPRD memberikan keputusan untuk melakukan realokasi kegiatan-kegiatan di SKPD. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa terdapat 11 kegiatan yang terdampak refocusing sehingga anggaran kegiatan tersebut dimatikan. Secara rinci hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dan pencapaian Renstra Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan Tahun 2020, dapat dilihat pada tabel 2.2. Dalam tabel dimaksud dapat dilihat capaian masing-masing kegiatan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada Tahun 2020 dan 2021.

Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa s.d. Tahun 2020 Provinsi DKI Jakarta

Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2020			Target kegiatan (Renja tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2020	
									Target Renja tahun 2020	Realisasi Renja tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d 2021	Tingkat Capaian Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4				Unsur penunjang Urusan Pemerintaha									
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	06			Keuangan									
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	06	01		Program kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Pengadaan Barang/Jasa Tepat Waktu	95	87,5	90	90	100	92,5		
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	06	01	001	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah dokumen pedoman dan standar pelaksanaan serta laporan tenaga pendukung pokja	12	0	12	12	100	12		
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	06	01	004	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Tenaga Pendukung Pokja dan Tenaga Asisten Pengelola Barang/Jasa	12	0	12	12	100	12		
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	06	01	002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Sistem Pengadaan Barang/Jasa yang dibangun dan dipelihara	5	5	5	5	100	5		
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	06	02	001	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Jumlah sistem informasi pengadaan barang/jasa yang terimplementasi	5	5	5	5	100	5		
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	06	02	001		Jumlah Laporan kinerja tenaga helpdesk sistem dan pemeliharaan server	12	12	12	12	100	12		
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	06	02	002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Modul dalam Sistem Pengadaan Barang/Jasa	3	3	1	1	100	3		
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	06	02	006	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan Sosialisasi dan publikasi	300	600	0	0	0	0		

Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2020			Target kegiatan (Renja tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2020	
									Target Renja tahun 2020	Realisasi Renja tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d 2021	Tingkat Capaian Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=((11/5)
						peraturan pengadaan Barang/Jasa								
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	06	02	009	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pegawai dan peserta yang mengikuti FGD dan pembinaan permasalahan Pengadaan Barang/Jasa	12	12	12	12	100	100		
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	06	02	010	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	420	1600	0	0	0	0		
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	06	02	011	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan FGD permasalahan barang/jasa	5	3	1	1	100	3		
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	06	03		Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan kinerja Tenaga Ahli/Nara Sumber dalam proses Pengadaan Barang/Jasa	12	12	12	12	100	12		
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	06	03	001	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	indeks kepuasan pelayanan kantor	4	4	4	4	100	4		
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	06	03	002	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	4	4	4	4	100	4		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai kepuasan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta Persentase penyelesaian administrasi keuangan	4	4	4	4	100	4		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai kepuasan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	4	4	4	4	100	4		
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai kepuasan penatausahaan keuangan	100	12	100	100	100	100		

Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2020			Target kegiatan (Renja tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2020	
									Target Renja tahun 2020	Realisasi Renja tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d 2021	Tingkat Capaian Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum	4	4	4	4	100	4		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor terhadap ketersediaan alat tulis, peralatan dan perlengkapan Kantor	4	4	4	4	100	4		
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai kepuasan layanan kebersihan kantor dan kepuasan layanan peralatan rumah tangga	4	4	4	4	100	4		
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai kepuasan pelayanan terhadap kebutuhan kantor cetakan dan penggandaan	4	4	4	4	100	4		
					Penyediaan Bahan/Material	Nilai kepuasan penyediaan BBM/KDO	4	22	15	15	100	4		
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap penyediaan makanan dan minuman	4	4	4	4	100	4		
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang dikelola	12		12	12	10	12		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kepuasan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	4	4	100	4		
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai kepuasan pelayanan terhadap penyediaan mesin fotokopi	4	4	4	4	100			
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan kinerja petugas	12	12	12	12	100	12		

Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2020			Target kegiatan (Renja tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2020	
									Target Renja tahun 2020	Realisasi Renja tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d 2021	Tingkat Capaian Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	4	4	4	4	100	4		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah KDO/KDO Khusus yang memiliki surat izin dan yang berfungsi/dapat digunakan	22	22	22	22	100	22		
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan perlengkapan kerja yang terpelihara	256	265	0	0	100	110		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta s.d. Tahun 2022

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Renstra Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa				Realisasi Capaian					Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase Pengadaan Barang/Jasa Tepat waktu	-	Jumlah Pengadaan barang/jasa tepat waktu dibagi jumlah paket lelang yang sudah selesai. Tepat waktu adalah lebih cepat atau sama dengan standar waktu sesuai ketentuan/peraturan	85%	87,5%	90%	92,5%	100%	100%	100%					
	Persentase penyelesaian pengadaan barang/jasa	-	Jumlah Penyelesaian Pengadaan barang/jasa dibagi jumlah pengajuan oleh SKPD/UKPD yang sudah diumumkan. Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa adalah sampai dengan selesainya masa sanggah.	0%	95%	96%	97%	100%	100%	100%					

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta

Dari hasil identifikasi permasalahan di Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta dapat dikemukakan di atas dan ada hal-hal lain yang dianggap penting dan relevan sebagai berikut:

1. Kasus hukum yang menjadi headline pemberitaan;
2. Sulitnya memenuhi jumlah staf sesuai dengan analisa beban kerja
3. Pemanggilan/gugatan oleh pihak eksternal atas penerapan strategi pengadaan;
4. Beban kerja yang tidak seimbang antar fungsi;
5. Batal lelang atau batal kontrak.

2.4 Review terhadap Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

Perbandingan antara Renja Perangkat Daerah dengan hasil analisis kebutuhan tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

Lampirkan table berikut.

Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Tabel 2.4 Review Terhadap PD Tahun 2022
Provinsi DKI Jakarta

Nama Perangkat Daerah: Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa

Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah	No.	Rencana Kerja (Renja) PD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	1	Program kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	DKI Jakarta	Persentase Pengadaan Barang/Jasa Tepat Waktu	95%	13.038.200.322	Program kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	DKI Jakarta	Persentase Pengadaan Barang/Jasa Tepat Waktu	13.038.200.322	
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	1.1	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	DKI Jakarta	Jumlah dokumen pedoman dan standar pelaksanaan serta laporan tenaga pendukung pokja	12	1.231.588.512	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	DKI Jakarta	Jumlah dokumen pedoman dan standar pelaksanaan serta laporan tenaga pendukung pokja	1.231.588.512	
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	1.3	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Tenaga Pendukung Pokja dan Tenaga Asisten Pengelola Barang/Jasa	12	1.231.588.512	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Tenaga Pendukung Pokja dan Tenaga Asisten Pengelola Barang/Jasa	1.231.588.512	
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	1.4	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	DKI Jakarta	Jumlah Sistem Pengadaan Barang/Jasa yang dibangun dan dipelihara	5	11.284.310.810	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	DKI Jakarta	Jumlah Sistem Pengadaan Barang/Jasa yang dibangun dan dipelihara	11.284.310.810	
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	1.5	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	DKI Jakarta	Jumlah tenaga helpdesk Sistem dan pemeliharaan server	17	10.455.410.810	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	DKI Jakarta	Jumlah tenaga helpdesk Sistem dan pemeliharaan server	10.455.410.810	
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	1.6	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	DKI Jakarta	Jumlah Modul dalam Sistem Pengadaan Barang/Jasa	2	745.200.000	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	DKI Jakarta	Jumlah Modul dalam Sistem Pengadaan Barang/Jasa	745.200.000	

Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	1.7	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	DKI Jakarta	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan Sosialisasi dan publikasi peraturan pengadaan Barang/Jasa	600	83.700.000	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	DKI Jakarta	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan Sosialisasi dan publikasi peraturan pengadaan Barang/Jasa	83.700.000	
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	1.8	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	DKI Jakarta	Jumlah pegawai dan peserta yang mengikuti FGD dan pembinaan permasalahan Pengadaan Barang/Jasa	300	674.635.000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	DKI Jakarta	Jumlah pegawai dan peserta yang mengikuti FGD dan pembinaan permasalahan Pengadaan Barang/Jasa	1.004.805.087	
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	1.9	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	DKI Jakarta	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	300	169.260.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	DKI Jakarta	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	311.805.087	
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	1.10	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	DKI Jakarta	Jumlah pegawai yang mengikuti FGD permasalahan Pengadaan Barang/Jasa	300	81.375.000	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	DKI Jakarta	Jumlah pegawai yang mengikuti FGD permasalahan Pengadaan Barang/Jasa	78.760.000	
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	1.11	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	DKI Jakarta	Jumlah Tenaga Ahli/Nara Sumber Pengadaan Barang/Jasa	200	424.000.000	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	DKI Jakarta	Jumlah Tenaga Ahli/Nara Sumber Pengadaan Barang/Jasa	614.240.000	
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	1.12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	DKI Jakarta	indeks kepuasan pelayanan kantor	4	86.776.825.116	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	DKI Jakarta	indeks kepuasan pelayanan kantor	86.776.825.116	
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	DKI Jakarta	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	4	199.136.400	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	DKI Jakarta	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	199.136.400	
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	2.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Nilai kepuasan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta Persentase penyelesaian administrasi keuangan	4	80.433.052.184	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Nilai kepuasan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta Persentase penyelesaian administrasi keuangan	80.433.052.184	

Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	2.2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DKI Jakarta	Nilai kepuasan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	4	80.418.537.184	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DKI Jakarta	Nilai kepuasan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	80.418.537.184	
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	Nilai kepuasan penatausahaan keuangan	4	14.515.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	Persentase penyelesaian administrasi keuangan	14.515.000	
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum	4	3.330.693.138	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum	3.330.693.138	
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor terhadap ketersediaan alat tulis, peralatan dan perlengkapan Kantor	4	2.127.131.380	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor terhadap ketersediaan alat tulis, peralatan dan perlengkapan Kantor	2.127.131.380	
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DKI Jakarta	Nilai kepuasan layanan kebersihan kantor dan kepuasan layanan peralatan rumah tangga	4	24.337.984	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DKI Jakarta	Nilai kepuasan layanan kebersihan kantor dan kepuasan layanan peralatan rumah tangga	24.337.984	
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DKI Jakarta	Nilai kepuasan pelayanan terhadap kebutuhan kantor cetakan dan penggandaan	4	199.551.110	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DKI Jakarta	Nilai kepuasan pelayanan terhadap kebutuhan kantor cetakan dan penggandaan	199.551.110	
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	3.3	Penyediaan Bahan/Material	DKI Jakarta	Nilai kepuasan penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	4	199.136.400	Penyediaan Bahan/Material	DKI Jakarta	Jumlah KDO yang berfungsi/dapat digunakan	199.136.400	
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	3.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap penyediaan makanan dan minuman	4	337.700.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap penyediaan makanan dan minuman	337.700.000	

Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	3.5	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Arsip Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang dikelola	4	442.836.264	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Arsip Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang dikelola	442.836.264	
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	3.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks kepuasan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	2.811.635.234	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks kepuasan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.811.635.234	
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Nilai kepuasan pelayanan terhadap penyediaan mesin fotokopi	4	337.154.400	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	Nilai kepuasan pelayanan terhadap penyediaan mesin fotokopi	337.154.400	
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Nilai Kepuasan terhadap Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	2.474.480.834	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKI Jakarta	Jumlah laporan kinerja petugas	2.474.480.834	
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	4	400.580.960	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	400.580.960	
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah KDO/KDO Khusus yang memiliki surat izin dan yang berfungsi/dapat digunakan	22	196.985.700	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI Jakarta	Jumlah KDO/KDO Khusus yang memiliki surat izin dan yang berfungsi/dapat digunakan	196.985.700	
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan perlengkapan kerja yang terpelihara	265	203.595.260	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah peralatan perlengkapan kerja yang terpelihara	203.595.260	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BPPBJ tidak memiliki usulan program kegiatan masyarakat karena fungsi BPPBJ adalah melayani pengadaan barang/jasa sesuai usulan dari SKPD/UKPD.

Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Provinsi DKI Jakarta
Nama Perangkat Daerah Badan Pelayanan Pengadaan Barang/jasa

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan



3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020

Kebijakan Nasional yang menjadi salah satu rujukan bagi Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 adalah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dengan tema “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”. RKP Tahun 2022 adalah RKP transisi, menunggu RPJMN Tahun 2020-2024 selesai disusun, sehingga dalam menentukan stuktur prioritasnya menggunakan RKP sebelumnya.

Prioritas Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2022 antara lain yaitu:

- 1. Pembangunan manusia;
- 2. Penguatan konektivitas;
- 3. Peningkatan nilai tambah ekonomi;
- 4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air;
- 5. Stabilitas keamanan nasional.

Merujuk kepada lima prioritas tersebut, tidak ada yang berkaitan secara langsung dengan tugas dan fungsi Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta selaku pengemban urusan Keuangan

3.1.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

TPB/SDGs merupakan kerangka kerja pembangunan yang memiliki tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. TPB/SDGs diformulasikan ke dalam 17 Goals, 169 Target/Sasaran, dan 241 Indikator. Dalam Gambar 3.1 terdapat rincian tujuh belas tujuan TPB/SDGs.

Gambar 3.1
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)



Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki keterkaitan erat terhadap 17 tujuan TPB/SGs.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2022 merujuk kepada Rencana Strategis Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Di mana tujuannya adalah mendukung tercapainya Misi ke-3 RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2020, secara berurutan yaitu “Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas. Sehingga tujuan dan sasaran Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta seperti yang terdapat dalam Tabel 3.1.

Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1.	Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan mengacu pada prinsip Value for Money	Terlaksananya prinsip Value For Money dalam proses pengadaan barang/jasa	Opini laporan keuangan daerah / Indeks Kepuasan Layanan PBJ				4	4
2.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan yang akuntabel	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Skor EKPPD / Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran				3.25	

3.3 Program dan Kegiatan

Program yang digunakan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada tahun 2018 berbeda dengan yang digunakan sebelumnya. Sebab, Renja 2018 adalah Renja peralihan yang tidak berpedoman kepada RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 dan RPJMD 2017-2022 belum mulai disusun.

Pada Renja 2022 menggunakan program yang terdapat di Renstra Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2017-2022 terdiri 1 program utama dan 1 program operasional. Program tersebut antara lain:

- 1. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
- 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2022 berserta rencana pendanaannya terdapat dalam Tabel 3.2 yang menampilkan program, kegiatan, dan rencana anggaran Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2022. Pada tahun ini terdapat 2 program dan 20 kegiatan. Penjelasan secara rinci terdapat dalam Tabel 3.2 berikut. Data anggaran pada Tabel 3.2 berdasarkan tarikan sistem www.apbd.jakarta.go.id.

Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2022 Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4					Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		DKI Jakarta						
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	01				Sekretariat Daerah		DKI Jakarta						
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	01	07			Program kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Pengadaan Barang/Jasa Tepat Waktu	DKI Jakarta	95%	13.038.200.322	PAD		95%	4.011.288.589
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah dokumen pedoman dan standar pelaksanaan serta laporan tenaga pendukung pokja	DKI Jakarta	12	1.231.588.512	PAD		12	1.359.767.937
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	01	07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Tenaga Pendukung Pokja dan Tenaga Asisten Pengelola Barang/Jasa	DKI Jakarta	12	1.231.588.512	PAD		12	1.293.167.937
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	01	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Sistem Pengadaan Barang/Jasa yang dibangun dan dipelihara	DKI Jakarta	5	11.284.310.810	PAD		5	1.646.715.565
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	01	07	1.02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Jumlah tenaga helpdesk Sistem dan pemeliharaan server	DKI Jakarta	17	10.455.410.810	PAD		17	756.375.565

Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	01	07	1.02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Modul dalam Sistem Pengadaan Barang/Jasa	DKI Jakarta	2	745.200.000	PAD		2	819.720.000
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	01	07	1.02	03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan Sosialisasi dan publikasi peraturan pengadaan Barang/Jasa	DKI Jakarta	600	83.700.000	PAD		600	70.620.000
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pegawai dan peserta yang mengikuti FGD dan pembinaan permasalahan Pengadaan Barang/Jasa	DKI Jakarta	300	674.635.000	PAD		300	1.004.805.087
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	01	07	1.03	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	DKI Jakarta	300	169.260.000	PAD		300	311.805.087
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	01	07	1.03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pegawai yang mengikuti FGD permasalahan Pengadaan Barang/Jasa	DKI Jakarta	300	81.375.000	PAD		300	78.760.000
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	01	07	1.03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Tenaga Ahli/Nara Sumber Pengadaan Barang/Jasa	DKI Jakarta	200	424.000.000	PAD		200	614.240.000
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	01	07			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	indeks kepuasan pelayanan kantor	DKI Jakarta	4	86.776.825.116	PAD		4	98.419.397.245
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	01	07			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	DKI Jakarta	4	199.136.400	PAD		4	275.117.076
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	01	07	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan	DKI Jakarta	4	80.433.052.184	PAD		4	92.145.828.740

Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	01	07	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai kepuasan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	DKI Jakarta	4	80.418.537.184	PAD		4	92.137.127.930
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	01	07	1.02	02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelesaian administrasi keuangan	DKI Jakarta	4	14.515.000	PAD		4	8.701.350
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	01	07	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum	DKI Jakarta	4	3.330.693.138	PAD		4	3.486.286.014
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	01	07	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor terhadap ketersediaan alat tulis, peralatan dan perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	4	2.127.131.380	PAD		4	2.074.081.812
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	01	07	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai kepuasan layanan kebersihan kantor dan kepuasan layanan peralatan rumah tangga	DKI Jakarta	4	24.337.984	PAD		4	96.957.443
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	01	07	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai kepuasan pelayanan terhadap kebutuhan kantor cetakan dan penggandaan	DKI Jakarta	4	199.551.110	PAD		4	272.241.046
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	01	07	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah KDO yang berfungsi/dapat digunakan	DKI Jakarta	4	199.136.400	PAD		4	219.050.040
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	01	07	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap penyediaan makanan dan minuman	DKI Jakarta	4	337.700.000	PAD		4	384.381.250
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	01	07	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang dikelola	DKI Jakarta	4	442.836.264	PAD		4	439.574.423
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	01	07	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kepuasan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4	2.811.635.234	PAD		4	2.909.034.495

Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	01	07	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai kepuasan pelayanan terhadap penyediaan mesin fotokopi	DKI Jakarta	4	337.154.400	PAD		4	329.662.080
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	01	07	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan kinerja petugas	DKI Jakarta	12	2.474.480.834	PAD		12	2.5779.372.415
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	01	07	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	DKI Jakarta	4	400.580.960	PAD		4	153.365.072
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	01	07	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah KDO/KDO Khusus yang memiliki surat izin dan yang berfungsi/dapat digunakan	DKI Jakarta	22	196.985.700	PAD		22	56.057.036
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	01	07	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan perlengkapan kerja yang terpelihara	DKI Jakarta	265	203.595.260	PAD		265	97.298.036

RENCANA KERJA & PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Renja Perangkat Daerah

4

4.1 Rencana Kerja, Target, dan Pendanaan

4.1.1 Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa tahun 2021

Sebagai salah satu inisiatif atas terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam proses pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sistem pengadaan barang/jasa yang optimal diharapkan mampu mempertajam belanja daerah baik itu belanja yang dilaksanakan secara langsung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah/Badan Layanan Umum Daerah/Unit Pelayanan Teknis/Unit lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau belanja yang dilaksanakan secara tidak langsung yang dilakukan oleh penerima bantuan social dan subsidi. Selain itu, sistem pengadaan barang/jasa yang optimal juga diharapkan berdampak pada pembentukan ekosistem pasar barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terbuka untuk persaingan pelaku usaha yang pada akhirnya mendorong efisiensi belanja daerah. Seiring dengan perubahan nomenklatur kode rekening didalam permendagri Nomor 90 tahun 2019, maka dilakukan juga revisi pada RPJMD Tahun 2017-2022, dalam RPJMD tahun 2017-2022 ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengintegrasikan seluruh proses pengadaan barang/jasa dalam Siste, Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang merupakan *mirroring* sistem LKPP serta mengembangkan e-katalog daerah. Untuk mendukung pengembangan UMKM, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa akan mengembangka *marketplace* pasar dan BUMD, serta pembelanjaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dengan sinergi antar BUMD, antara lain melalui *payment gateway* oleh Bank DKI dan *vendor management system* oleh Perumda Pasar Jaya. Sampai dengan tahun 2022 pengadaan langsung belanja makan/minum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditargetkan 100% melalui *e-order*. Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa diampu dalam 2 (dua) program :

1. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

4.1.2 Target Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa tahun 2021

Target Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa untuk belanja langsung untuk makan dan minum dibawah 50 juta melalui e-order adalah sebagai berikut:

1. Sampai dengan akhir tahun 2021, target belanja langsung dibawah 50 juta melalui e-order : 50%
2. Sampai dengan tahun 2022, target belanja langsung dibawah 50 juta melalui e-order : 100%

4.1.3 Pendanaan Kegiatan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa tahun 2021

Seluruh pendanaan kegiatan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022.

Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Tabel 4.4. Berisi Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2022

NO	Perangkat Daerah	Urusan	Program	Outcome/Target	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Target (Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan)	Pagu Kegiatan	Pagu Kegiatan Tahun 2022	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Kuangan	Program kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Pengadaan Barang/Jasa Tepat Waktu					13.038.200.322	
2.	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Kuangan			Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa		Jumlah dokumen pedoman dan standar pelaksanaan serta laporan tenaga pendukung pokja	1.359.767.937	1.231.588.512	
3.	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Kuangan				Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Tenaga Pendukung Pokja dan Tenaga Asisten Pengelola Barang/Jasa	1.293.167.937	1.231.588.512	
4.	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Kuangan			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Jumlah Sistem Pengadaan Barang/Jasa yang dibangun dan dipelihara	1.646.715.565	11.284.310.810	
	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Kuangan				Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Jumlah laporan kinerja tenaga helpdesk sistem dan pemeliharaan server		10.455.410.810	
5.	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Kuangan					Jumlah sistem informasi pengadaan abrang/jasa yang terimplementasi	756.375.565	10.455.410.810	
6.	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Kuangan				Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Modul dalam Sistem	819.720.000	745.200.000	

Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

							Pengadaan Barang/Jasa			
7.	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Kuangan				Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan Sosialisasi dan publikasi peraturan pengadaan Barang/Jasa	70.620.000	83.700.000	
NO	Perangkat Daerah	Urusan	Program	Outcome/Target	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Target (Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan)	Pagu Kegiatan	Pagu Kegiatan Tahun 2022	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8.	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Kuangan			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah pegawai dan peserta yang mengikuti FGD dan pembinaan permasalahan Pengadaan Barang/Jasa	1.004.805.087	674.635.000	
9.	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Kuangan				Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	311.805.087	169.260.000	
10.	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Kuangan				Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan FGD permasalahan barang/jasa	78.760.000	81.375.000	
11.	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Kuangan				Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan kinerja tenaga ahli/nara sumber dalam proses pengadaan barang/jasa	614.240.000	424.000.000	
12.	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Kuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	indeks kepuasan pelayanan kantor				86.776.825.116	86.776.825.116	
13.	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Kuangan		indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional				199.136.400	199.136.400	

Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

14.	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Kuangan			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Nilai kepuasan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta Persentase penyelesaian administrasi keuangan	92.145.828.740	92.145.828.740	
15.	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Kuangan				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai kepuasan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	92.137.127.930	92.137.127.930	
16.	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Kuangan				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai kepuasan penatausahaan keuangan	8.701.350	8.701.350	
17.	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Kuangan			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum	3.486.286.014	3.486.286.014	
18.	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Kuangan				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor terhadap ketersediaan alat tulis, peralatan dan perlengkapan Kantor	2.074.081.812	2.074.081.812	
19.	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Kuangan				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai kepuasan layanan kebersihan kantor dan kepuasan layanan peralatan rumah tangga	96.957.443	96.957.443	
20.	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Kuangan				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai kepuasan pelayanan terhadap kebutuhan kantor cetakan dan penggandaan	272.241.046	272.241.046	
21.	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Kuangan				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah KDO yang berfungsi/dapat digunakan	219.050.040	219.050.040	

Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

22.	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Kuangan				Facilitasi Kunjungan Tamu	Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap penyediaan makanan dan minuman	384.381.250	384.381.250	
23.	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Kuangan				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang dikelola	439.574.423	439.574.423	
24.	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Kuangan			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indeks kepuasan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.909.034.495	2.909.034.495	
25.	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Kuangan				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai kepuasan pelayanan terhadap penyediaan mesin fotokopi	329.662.080	329.662.080	
26.	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Kuangan				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan kinerja petugas	2.5779.372.415	2.5779.372.415	
27.	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Kuangan			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	153.365.072	153.365.072	
28.	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Kuangan				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah KDO/KDO Khusus yang memiliki surat izin dan yang berfungsi/dapat digunakan	56.057.036	56.057.036	
29.	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Kuangan				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan perlengkapan kerja yang terpelihara	97.298.036	97.298.036	

PENUTUP



Penutup dokumen Renja

Dokumen Renja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 2022 merupakan perencanaan kerja untuk periode tahun 2022. Renja merupakan penjabaran dari Renstra Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2017-2022 dengan mempedomani RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021. Fungsi Renja 2021 adalah sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2022.

Sebagai pedoman kerja, pelaksanaan Renja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2022 ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Anggaran pelaksanaan Renja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2022 akan dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022;
3. Pelaksanaan DPA Tahun 2022 akan dimonitoring setiap bulan dan dilaporkan kepada Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa setiap 3 bulan. Pada akhir tahun pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2022 akan dievaluasi sebagai bahan penyusunan Renja 2023.

Selanjutnya, Renja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 akan dijabarkan ke dalam Rencana Aksi 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2022.

Jakarta, 22 Juli 2021

Plt. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Sigit Wijatmoko, A.P, M.Si
NIP. 197408301993111001